

---

**MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA**

---

**Agung Kurniawan S. Djibran**

Universitas Muhammadiyah Luwuk

email: [djibranagung77@gmail.com](mailto:djibranagung77@gmail.com)

**Abstract**

*Education requires input from various parties in the formulation of its policies. Given that the moral crisis is escalating, strict educational management is needed. Education is a process of instilling and developing values and norms that are implicit in every subject, including Islamic education and its teachers. Therefore, it is not only Islamic education teachers who have the responsibility to educate students' morals and character, but this also applies to all educators. Efforts to improve the quality of Islamic education have been widely implemented. The aim is to convey the meaning of education that serves to build the character and morals of a dignified nation in order to educate the nation, develop the potential of Indonesians who are faithful and devoted to God Almighty, have noble morals, are healthy, knowledgeable, skilled, creative, and independent. The shortcomings and strengths of each school will have an impact and require different approaches. Appropriate policies and management will yield positive outcomes aligned with the institution's objectives. Conversely, if management and policies are not tailored to the institution's needs, failure is inevitable. Do not merely focus on the policies and management of other institutions that appear effective and successful. Every institution has different needs and objectives, so policies and management in each school will also differ and should be tailored to their respective needs.*

**Keywords:** Management, Educational Policy, Islamic Education

**Abstrak**

Pendidikan memerlukan banyak sentuhan dari berbagai pihak dalam pembentukan kebijakannya. Menilai bahwa krisis moral semakin meningkat maka diperlukan manajemen pendidikan yang ketat. Pendidikan merupakan proses penanaman dan pengembangan nilai dan norma yang implisit pada setiap mata pelajaran, termasuk pendidikan agama Islam dan juga guru-gurunya. Maka dari itu, tidak hanya guru PAI yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik moral dan akhlak siswa, tetapi itu juga berlaku bagi seluruh tenaga pendidik. Usaha peningkatan kualitas pendidikan agama Islam sudah banyak diterapkan. Tidak lain tujuannya adalah untuk menyampaikan makna pendidikan yang berfungsi membangun watak serta akhlak bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa membangun potensi manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa, berakhlak Mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri. Adanya kekurangan dan kelebihan pada setiap lembaga sekolah akan berpengaruh

dan memerlukan penanganan yang tidak sama juga. Kebijakan dan penanganan yang tepat akan memberikan dampak yang baik dan sesuai harapan suatu lembaga. Sebaliknya jika manajemen dan kebijakannya tidak diperhatikan dan disesuaikan dengan lembaga tersebut, maka kegagalanlah yang akan ditemui. Jangan hanya fokus pada kebijakan dan manajemen lembaga lain yang terlihat efektif dan sukses. Setiap lembaga memiliki kebutuhan dan tujuan yang berbeda-beda, sehingga kebijakan dan manajemen disetiap sekolah pun akan berbeda pula dan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan masing masing.

**Kata Kunci:** Manajemen, Kebijakan Pendidikan, Pendidikan Islam

## PENDAHULUAN

Pendidikan adalah tonggak utama pembangunan masyarakat, karena pendidikan menjadi pondasi utama bagi perkembangan dan kemajuan sebuah negara. Sehingga perencanaan dan pelaksanaan pendidikan harus di susun dan dilaksanakan dengan baik agar tercapai tujuan pendidikan yang telah dirumuskan (Hasanah et al., 2024). Tujuan pendidikan di Indonesia adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, berilmu, cakap, sehat, mandiri, kreatif, dan menjadi warga negara yang baik. Sedangkan tujuan pendidikan Islam juga memiliki keselarasan dengan tujuan pendidikan nasional yaitu untuk menciptakan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah sehingga dapat mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Lebih dari itu, pribadi yang bertakwa akan menjadikan *Rahmatan Lilalamin*, sebagai masyarakat. Pendidikan Islam berlangsung sejak adanya manusia pertama yang Allah SWT ciptakan yaitu (Nabi Adam dan Hawa). Ayat al-Qur'an yang diturunkan Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw juga dimulai dengan perintah *Iqra* (membaca, merenungkan, menelaah, meneliti atau mengkaji). Ayat yang pertama kali turun ini adalah perintah untuk mencerdaskan kehidupan manusia secara akademis maupun praktis. Dengan diturunkannya *iqra'*, Menurut Muhaimin, manusia harusnya memikirkan, menelaah dan meneliti bagaimana pelaksanaan pendidikan itu sendiri, sehingga muncullah pemikiran dan teori-teori pendidikan Islam (Muhaimin, 2003).

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, pendidikan Islam adalah salah satu sistem pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional dapat tercapai jika Pendidikan Islam dapat tercapai sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Indonesia itu sendiri. Lembaga pendidikan Islam formal, misalnya Madrasah dianggap masih belum dapat memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat. Indikator yang paling terlihat adalah lulusan lembaga tersebut bahkan masih

tidak dapat memenuhi harapan lembaga ketenagakerjaan dengan alasan belum cakap atau masih perlu belajar. Mata pelajaran pendidikan agama Islam, madrasah jauh lebih spesifik dari pelajaran agama disekolah umum negeri, mata pelajaran pendidikan agama Islam yang lebih banyak, menjadikan maderasah lembaga pendidikan yang mampu mengajarkan akhlak (moral) dibandingkan dengan sekolah umum.

Dalam hal ini, ada perbedaan pandangan diantara para ahli. Ada yang berpendapat bahwa timbulnya krisis moral atau akhlak disebabkan karena adanya kegagalan pada pendidikan Agama Islam dan ada para ahli yang berpendapat bahwa munculnya krisis tersebut bukan karena pendidikan agama Islam. Menilai bahwa krisis moral semakin meningkat seperti kriminalitas, korupsi, penyalahgunaan narkoba dan lain-lain lebih disebabkan lemahnya penegakan hukum, gaya hidup yang tidak terkontrol, dan kurangnya keteladanan pada kebaikan sehingga membuat krisis moral menjadi semakin merabak. Pendidikan merupakan proses penanaman dan pengembangan nilai dan norma yang implisit pada setiap mata pelajaran, termasuk pendidikan agama Islam dan juga guru-gurunya. Maka dari itu, tidak hanya guru PAI yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik moral dan akhlak siswatetapi itu juga berlaku bagi seluruh tenaga pendidik. Usaha peningkatan kualitas pendidikan agama Islam sudah banyak diterapkan. Tidak lain tujuannya adalah untuk menyampaikan makna pendidikan yang berfungsi membangun watak serta akhlak bangsa yang ber martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa membangun potensi manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa, berakhlak Mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis.

## **METODE PENELITIAN**

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode content analysis dan proses tahapan kerjanya berupa hasil dari telaah peneliti terhadap sumber-sumber artikel dan jurnal yang berkaitan dengan objek kajian. Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, peneliti menganalisis data tersebut dengan menggunakan *content analysis* sehingga diperoleh gambaran dan uraian bagaimana sistem Manajemen dan kebijakan Pendidikan Islam itu sendiri.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Manajemen Kebijakan Pendidikan Islam**

Manajemen berasal dari kata kerja *to manage* yang berarti mengurus (Sulistyorini, 2009). Manajemen berarti mengatur, mengurus, mengendalikan, mengelola, menjalankan, melaksanakan dan memimpin. Manajemen menurut Muhammad Abdul Jawwad (2004) menata, menggabungkan, menertibkan, mengatur, menata, dan merapikan hal-hal disekitarnya. Sedangkan pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses, cara dan perbuatan mendidik (KBBI, 2012). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan adalah proses pengelolaan sumber daya dalam lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Dalam manajemen pendidikan melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh kegiatan pendidikan, termasuk sumber daya manusia, keuangan dan fasilitas.

Berbicara tentang manajemen pendidikan, tidak terlepas dari sebuah kebijakan. Sebagaimana dijelaskan oleh para ahli, kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan dari sebuah proses, dan merupakan hasil dari kesimpulan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi dan misi pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan di masyarakat dalam waktu tertentu. Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik khusus yaitu memiliki tujuan pendidikan yang sudah disepakati lembaga sesuai dengan kebutuhannya. Untuk memberlakukan kebijakan pendidikan tentu saja ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk suatu lembaga. Maka kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat yang sesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah lembaga tersebut bernaung. Sehebat apapun gagasan pendidikan yang dibangun oleh para tokoh pendidikan, pada akhirnya harus memperhitungkan aspek legalitas agar diterima dengan baik. Parameter yang digunakan user pendidikan hari ini adalah legalitas sebuah institusi pendidikan dengan pengakuan politik. Dengan begitu, pendidikan tidak terlepas dari politik (Tilaar 2003). Segala kebijakan tentang pendidikan pada dasarnya merupakan keputusan politik, baik di tingkat lokal maupun nasional (Supriadi 2003).

Kebijakan pendidikan harus dibuat oleh orang yang berwenang, yaitu para ahli dibidangnya agar tidak menimbulkan ketidaksesuaian pada

pendidikan dan lingkungan diluar pendidikan. Para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan, dan para politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan adalah unsur minimal pembuat kebijakan pendidikan tersebut. Kebijakan pendidikan yang telah dibuat, dapat diuji dengan evaluasi untuk dapat dipertahankan dan dikembangkan, namun jika terdapat kekurangan maka harus dilakukan perbaikan secara bersama dan disesuaikan kembali. Terkait dengan pendidikan agama Islam dan dinamika kebijakan politik di Indonesia, dimana pendidikan agama Islam diajarkan di setiap jenjang pendidikan formal, mulai sekolah dasar, sekolah menengah sampai perguruan tinggi. Sekolah dalam sistem pendidikan di Indonesia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, semua operasional pendidikan dan sekolah ditentukan oleh kebijakan atasannya.

## **2. Evaluasi dan Ketercapaian Pendidikan**

Sebagai lembaga atau unit institusi sosial, maka lembaga pendidikan secara historis telah memberikan kepercayaan, keyakinan, nilai, pengetahuan, sains dan teknologi yang menjadi alat dalam proses sosialisasi sebagai fungsi esensial dalam setiap sistem politik (Syafurudin 2008). Untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan yang baik, perlu adanya evaluasi dan ketercapaian pendidikan.

Proses evaluasi merupakan bentuk dari pengawasan yang merupakan tahap akhir dalam manajemen. Evaluasi merupakan upaya yang sistematis untuk mengamati dan memantau apakah program kegiatan di suatu lembaga sudah sesuai dengan tujuan yang telah dibuat. Evaluasi berfokus pada proses pelaksanaan kegiatan dan hasil pelaksanaan kegiatan. Target yang harus dicapai ditunjukkan oleh indikator-indikator ketercapaian seperti: nilai akademis maupun praktiknya, kelakuan, moral, tutur kata dan kemampuan dalam berinteraksi. Berdasarkan pengembangan penilaian pendidikan dalam Standar Nasional Pendidikan, beberapa lembaga pendidikan telah mengembangkan penilaian seperti:

1. Perangkat model-model penilaian pembelajaran.
2. Model evaluasi pembelajaran.
3. Instrumen atau perangkat.
4. Pedoman Penyusunan Evaluasi.
5. Kerjasama dengan pihak-pihak terkait.

### **3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengembangan Manajemen Pendidikan**

Peningkatan kualitas, tentunya memerlukan beberapa faktor pendukung dalam pengembangan manajemen pendidikan seperti berikut ini.

#### **a. Kelembagaan**

Sebagai lembaga pendidikan, suatu sekolah harus memiliki landasan yuridis sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan, berupa: (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (2) Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.

#### **b. Sarana dan Prasarana Pendidikan**

Sarana dan prasarana yang tersedia di suatu lembaga diharapkan bisa memenuhi kelengkapan yang sesuai dengan kebutuhan masing masing sekolah supaya bisa tercapai tujuan yang diinginkan melalui sarana prasarana yang lengkap.

#### **c. Kurikulum**

Kurikulum merupakan inti dari proses pendidikan dan proses belajar mengajar dari awal semester sampai kenaikan kelas, kurikulum yang diterapkan di seluruh lembaga pendidikan negeri di Indonesia saat ini adalah kurikulum merdeka yang sudah ditetapkan pemerintah seperti itu. Sehingga lembaga pendidikan di Indonesia diharapkan dapat melaksanakan ketentuan kurikulum yang telah ada.

#### **d. Ketenagaan**

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan unsur pokok dalam pengembangan lembaga pendidikan. Secara umum keadaan tenaga pendidikan disekolah dibagi menjadi dua yaitu: 1) secara kuantitatif tenaga edukatif maupun administratif sudah terpenuhi, 2) tenaga edukatif pada umumnya telah menempuh pendidikan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh sekolah.

#### **e. Dukungan Orang Tua Siswa**

Orang tua siswa yang terhimpun pada organisasi Komite Sekolah dapat ikut andil dalam sudut pandangan masyarakat, supervisi, dan evaluasi dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan di suatu sekolah. Peran Komite Sekolah sebagai sumber dukungan dan sumbangan saran dan pendapat bagi sekolah yang akan ikut dipertimbangkan dalam pembentukan peraturan manajemen sekolah.

f. Kualitas Input dan Output Siswa

Kualitas input dan output siswa sangat menjadi pertimbangan dan pengaruh besar bagi suatu lembaga, yang mana hasil dari suatu lembaga berhasil atau gagal dilihat dari seberapa berkualitasnya output dari suatu sekolah tersebut.

g. Pendanaan

Untuk memperoleh hasil pendidikan yang lebih bermutu tentunya diperlukan dana yang mencukupi dan memadai. Oleh karena itu sarana dan fasilitas pendidikan perlu disiapkan dan ditata secara maksimal, sehingga siswa yang ada disekolah tersebut bisa menghasilkan pengetahuan yang nyata ke depan masyarakat dan khalayak di luar sekolah.

#### **4. Manajemen Strategik dan Kebijakan Pendidikan Islam**

Manajemen strategik adalah suatu proses dalam menentukan arah dan tujuan lembaga atau organisasi dalam jangka panjang serta formulasi strategik dan implementasi yang terencana dan sistematis. Manajemen strategik juga bisa diartikan sebagai rasionalisasi yang komprehensif tentang isu-isu yang dihadapi oleh eksekutif dalam kepemimpinannya di masa depan (Sumandar, 2016).

Peran manajemen strategik sangat penting untuk mendukung tercapainya pengelolaan yang efektif. Hal ini cukup beralasan karena :

1. Manajemen Strategik merupakan satu cara mensistematisasi berbagai keputusan yang paling penting.
2. Manajemen Strategik membantu mendidik para manajer/pimpinan agar menjadi pengambil keputusan yang lebih baik
3. Manajemen Strategik membantu meningkatkan komunikasi koordinasi perorangan, alokasi sumber daya dan perencanaan jangka pendek seperti penyusunan anggaran.

Manfaat-manfaat atau keuntungan dari Manajemen Strategik sebagai berikut:

1. Memberi arah jangka panjang yang akan dituju.
2. Membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi
3. Membuat satu organisasi menjadi lebih efektif.
4. Mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu organisasi dalam lingkungan yang semakin beresiko.
5. Aktivitas pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan untuk mencegah munculnya masalah di masa datang.

6. Keterlibatan karyawan dalam pembuatan strategi akan lebih memotifasi mereka pada tahap pelaksanaannya
7. Aktifitas yang tumpang tindih akan dikurangi
8. Keengganan untuk merubah dari karyawan lama dapat dikurangi

#### **5. Kebijakan Pendidikan Islam di era Globalisasi**

Pendidikan pada umumnya termasuk pendidikan Islam diharapkan mempunyai pengaruh yang signifikan pada pembentukan sumber daya manusia (*human capital*) yang bermutu dalam aspek kognitif, afektif maupun keterampilan, baik dalam aspek fisik mental maupun spiritual dan menuntut kualitas penyelenggaraan pendidikan yang baik agar kualitas proses dan hasil pendidikan dapat benar-benar berperan optimal dalam kehidupan masyarakat oleh karena itu diperlukan upaya berkesinambungan untuk membangun pendidikan secara terpadu baik pada tataran kebijakan sistem secara nasional, tataran institusi, tataran manajerial dan tataran teknis sehingga terdapat sinkronisasi serta sinergitas diantara tataran-tataran tersebut.

Pendidikan Islam di era globalisasi harus mampu berperan aktif dan efektif. Perannya diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan dan memajukan peradaban Islam dari segi pemikiran dan aplikasi praktisnya. Pendidikan Islam tidak hanya dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan dan keahlian keilmuan, kesejahteraan manusia dan lingkungan tetapi juga harus dapat menginternalisasikan nilai-nilai moral yang baik sebagai upaya untuk melawan dampak negatif dari globalisasi dan modernisasi saat ini (Yana & Susanti, 2024).

Upaya untuk mengatasi tantangan pendidikan Islam di era globalisasi adalah dengan melakukan perubahan menyeluruh terhadap struktur pendidikan Islam mulai dari tujuan, visi dan misi pendidikan Islam, manajemen lembaga pendidikan Islam, tenaga pengajar dan aspek lainnya. Pendidikan Islam juga harus berfungsi sebagai filter terhadap dampak negatif teknologi yang memiliki pengaruh tidak baik kepada peserta didik.

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada pembahasan materi Manajemen dan kebijakan Pendidikan Islam di atas, bahwa setiap lembaga pendidikan memiliki wewenang, tujuan dan kebutuhannya masing-masing tanpa terkecuali. Adanya kekurangan dan kelebihan pada setiap lembaga pendidikan akan berpengaruh dan memerlukan penanganan yang tidak sama juga. Kebijakan dan penanganan yang tepat akan memberikan dampak yang baik dan sesuai harapan dari suatu lembaga, sehingga lembaga akan bisa merasakan kekuatan



dari manajemen yang baik tersebut. Sebaliknya jika manajemen dan kebijakannya tidak diperhatikan dan disesuaikan dengan lembaga tersebut, maka kekacauan dan kegagalanlah yang akan ditemui. Jangan hanya fokus pada kebijakan dan manajemen lembaga lain, dikarenakan kebutuhan dan tujuan setiap lembaga berbeda-beda, tepatnya dalam menyusun manajemen pendidikan yang baik dan berkualitas harus disesuaikan dengan sekolah yang bersangkutan dan lingkungan tempat lembaga tersebut bernaung. Adanya penanganan manajemen yang tepat akan memberikan hasil dan dampak yg baik dan sesuai dengan tujuan yang telah dibuat.

Pendidikan memerlukan banyak sentuhan dari berbagai pihak dalam pembentukan kebijakannya. Menilai bahwa krisis moral semakin meningkat maka diperlukan manajemen pendidikan yang dapat menjawab tantangan zaman saat ini. Pendidikan merupakan proses penanaman dan pengembangan nilai dan norma yang implisit pada setiap mata pelajaran, termasuk pendidikan agama Islam. Tanggung jawab ini tidak hanya pada guru PAI untuk mendidik moral dan akhlak siswa, tetapi itu juga berlaku bagi seluruh tenaga pendidik di suatu lembaga pendidikan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Aziz, Safrudin. (2016). *Manajemen Mutu Perguruan Tinggi Koreksi dan Implementasi*. Yogyakarta: Gava Media.

Eisenschmidt, Eve, Lauri, Triin and Sillavee, Reet. (2019). “*Educational Policy and Leadership to Improve Democratic Citizenship Education*,” Brill, 124-144.

Hasanah, N., Nur, M. A., & Rahmatillah, S. A. (2024). *Analisis Faktor Penghambat dan Upaya untuk Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri*. 7, 3162–3169.

Lauder, Hugh. (2020). “*Revolutions in Educational Policy:: The Vexed Question of Evidence and Policy Development*” dalam *Knowledge, Policy and Practice in Education and the Struggle for Social Justice*, ed. oleh Andrew Brown dan Emma Wisby, *Essays Inspired by the Work of Geoff Whitty*, UCL Press.

Madyan, dan Munawwarah, El. (2020). *Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia*. Bengkulu: Literasiologi Indonesia

Mavunga, George. (2019). “*The Culture of Middle-level Academic Management at a Comprehensive South African University*” *Journal of Higher*

Education in Africa / Revue de l'enseignement supérieur en Afrique, Vol. 17, No. 1/2.

Muhaimin. (2015). *Manajemen Pendidikan: Aplikasi dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah*. Jakarta: Prenada Media Group.

Muid, Abd, dan Arfeinia, Rizka. (2020). "Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam".

Sagala, Syaiful. (2017). *Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Sumandar, A. E. (2016). *Manajemen strategik dan kebijakan pendidikan islam berkemajuan*. 1189–1194.

Sudiarti, Sri. Anwar, Kasful. Shaleh, Ahmad. S. (2020). "Sistem Manajemen Pendidikan Islam

Syafarudin. (2008) *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syafi'i. (2020). *Politik Pendidikan Agama di Sekolah: Studi Tentang Polemik Pendidikan Agama*.

Tilaar, HAR. (2003) *Kekuasaan dan Pendidikan*. Magelang: Indonesia Tera.

Tobroni. (2018). *Memperbincangkan Pemikiran Pendidikan Islam dari Idealisme Substantif Hingga Konsep Aktual*. Jakarta: Kencana.

Yana, H. H., & Susanti, L. (2024). *Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam dalam Menghadapi Tantangan Era Globalisasi di Madrasah*. 1(1), 1–13.